

Presiden Jokowi Hanya Tersenyum Saat Ditanya soal *Reshuffle* Kabinet

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak banyak komentar ketika ditanya wartawan soal isu perombakan atau *reshuffle* kabinetnya saat berada di Stasiun Manggarai.

Seperti Diberitakan sebelumnya, Ketua DPP PDIP Djaro Saiful Hidayat mendorong agar Presiden Jokowi melakukan evaluasi terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Hal itu merespons pernyataan Presiden Jokowi yang memberi sinyal akan adanya *reshuffle* kabinet. "Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djaro di Jakarta, Jumat (23/12). ● han

KAI Commuter Minta Maaf Soal Iklan Surat Sakit "Online" di KRL

JAKARTA (IM) - KAI Commuter akhirnya meminta maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan setelah adanya iklan jasa pembuatan surat sakit secara daring (*online*) yang terpasang di dalam kereta rel listrik (KRL).

Pemintaan maaf itu disampaikan setelah adanya twit viral yang diunggah oleh pemilik akun @sidenta dengan sebuah foto iklan bertuliskan "Dapatkan Surat Sakit Online Hanya 15 Menit".

"KAI Commuter mohon maaf atas ketidaknyamanannya, semoga ke depannya KAI Commuter dan mitra yang bekerja sama untuk promosi di commuteline, khususnya iklan, tidak hanya kreatif, namun juga edukatif," kata Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba dalam keterangannya, Senin (26/12).

Di sisi lain, kata Anne, jajarannya telah meminta PT Sehat Cepat Indonesia agar segera mengganti konten iklan dengan materi baru.

"KAI Commuter akan memberikan waktu kepada manajemen PT Sehat Cepat Indonesia agar mengganti materi atau konten iklan yang saat ini terpasang dengan

"Cluena..., ya, sudah," kata Jokowi sambil pamit meninggalkan wartawan.

Diketahui, Ketua DPP PDIP Djaro Saiful Hidayat menyebut perlu adanya evaluasi pada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.

Hal itu merespons pernyataan Presiden Jokowi yang memberi sinyal akan adanya *reshuffle* kabinet.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," kata Djaro di Jakarta, Jumat (23/12). ● han

materi atau konten baru yang lebih edukatif," ungkapnya. Karena iklan yang telah beredar di media sosial, Anne mengaku telah berkoordinasi dengan manajemen PT Sehat Indonesia, selaku perusahaan yang memasang iklan.

Menurutnya, masyarakat yang ingin mendapatkan surat sakit online dari PT Sehat Indonesia tetap harus melalui beberapa prosedur agar surat sakit itu dapat dikeluarkan. Sayangnya, Anne tidak menjelaskan bagaimana prosedur yang dimaksud.

"Apabila semua prosedur telah dilalui dan dinyatakan sesuai, maka surat sakit *online* tersebut baru dikeluarkan oleh dokter resmi dari manajemen PT Sehat Indonesia," ujarnya.

Anne pun mengapresiasi pengunggah twit tersebut, karena masih peduli terhadap pelayanan fasilitas kesehatan yang sesuai peraturan dan kode etik profesi.

"Bahwasanya kami melihat ini sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama pengguna Commuteline. Sebagai transportasi publik tentunya KAI Commuter akan memberikan pelayanan terbaik," ujar Anne. ● mei

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PANGLIMA TNI RESMIKAN SARANA PENDIDIKAN DI KOLAT KOARMADA I

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kanan) didampingi Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksdya TNI Ahmad Heri Purwono (kedua kiri) dan Kepala Dinas Fasilitas Pangkalan Angkatan Laut Laksma TNI Eko Sunarjanto (kedua kanan) menandatangani prasasti saat meresmikan sejumlah fasilitas infrastruktur di jajaran TNI AL di Ksatrian Mako Komando Latihan Koarmada I, Sunter, Jakarta Utara, Senin (26/12). Panglima TNI meresmikan sebanyak 16 infrastruktur di jajaran TNI AL di sejumlah satuan, empat diantaranya berupa sarana pendidikan di Kolat Koarmada I guna mencetak prajurit Jalasena yang profesional.

AKBP Bambang Kayun Mangkir dari Pemeriksaan Penyidik KPK

AKBP Bambang Kayun diduga menerima suap dari Herwansyah dan istrinya, Emilya Said. Keduanya masuk dalam DPO Polri.

JAKARTA (IM) - Perwira menengah kepolisian, AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto mangkir atau tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sediannya, Bambang Kayun diperiksa pada Jumat (24/12) sebagai tersangka penerima suap terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

"Informasi yang kami terima, yang bersangkutan tidak hadir dan tanpa konfirmasi alasan ketidak hadirannya,"

kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (26/12).

KPK bakal segera menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Bambang Kayun. KPK mengulimatam Bambang Kayun untuk kooperatif datang memenuhi panggilan selanjutnya.

"KPK mengingatkan agar yang bersangkutan kooperatif hadir dan segera memenuhi panggilan selanjutnya dari tim penyidik," pungkasnya.

AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugiharto ditetapkan sebagai tersangka kasus

suap dan gratifikasi terkait pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia).

"Benar, KPK telah memulai penyidikan baru mengenai dugaan korupsi suap dan gratifikasi terkait dengan pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia)," kata Ali Fikri.

Bambang Kayun ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan tersangka pihak pemberi suap merupakan pihak swasta. Namun, KPK belum membeberkan secara terang nama-nama tersangka dalam kasus ini.

Berdasarkan informasi yang didapat, Bambang Kayun diduga menerima suap dari Pasangan Suam Istri (Pasutri) Herwansyah dan Emilya Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian

Orang (DPO) Polri.

Bambang Kayun disinyalir telah menerima uang miliaran rupiah hingga mobil mewah saat menjabat sebagai Kasubag Pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM) bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri pada 2013 sampai dengan 2019.

Uang miliaran rupiah hingga mobil mewah tersebut diduga berkaitan dengan suap dan gratifikasi pemalsuan surat dalam perkara perebutan hak ahli waris PT ACM (Aria Citra Mulia).

KPK melalui Direktorat

Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemendikhum telah mencegah Bambang Kayun untuk bepergian ke luar negeri setelah ditetapkan sebagai tersangka. AKBP Bambang Kayun dicegah ke luar negeri untuk enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Tak hanya itu, KPK juga telah melakukan pemblokiran terhadap rekening milik Bambang Kayun serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini. Diduga, ada nominal angka yang sangat fantastis di rekening AKBP Bambang Kayun. ● mei

BANGUN 16 INFRASTRUKTUR TNI AL

Panglima TNI: Kesejahteraan Prajurit Merupakan yang Utama Bagi Saya

JAKARTA (IM) - Panglima TNI dan sekaligus KSAL, Laksamana Yudo Margono mengatakan, prioritasnya adalah kesejahteraan prajurit.

Yudo mengatakan bahwa TNI AL terus melaksanakan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis yang menunjang bagi satuan operasional baik bagi KRI, Marinir, Penerbangan TNI AL, satuan pendidikan, hingga fasilitas yang menunjang kesejahteraan prajurit serta keluarganya.

"Nah ini semua yang kita bangun untuk kesejahteraan prajurit. Ya tentunya sesuai dengan prioritas saya untuk sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan tangguh," kata Yudo di Komando Latihan (Kolat) Koarmada, Jakarta Utara, Senin (26/12).

Pada kesempatan itu, Yudo pun meresmikan sebanyak 16 infrastruktur di jajaran TNI AL di sejumlah satuan di tanah air. Dari 16 Fasilitas yang diresmikan, empat di antaranya merupakan sarana pendidikan yang ada di Komando Latihan Koarmada yaitu Gedung Mess Siswa Saturnus, Gedung

Danpuslat Aldebaran, Gedung Serbaguna Canopus, serta sarana rekreasi Kolam renang dan Jacuzzi yang diperuntukkan bagi prajurit dan keluarganya.

Selain itu Yudo juga diresmikan fasilitas yang berada di sejumlah satuan TNI AL yaitu Gedung Satkor Koarmada III, Mess Kowal Koarmada III, Mako Detasemen Kavaleri (Menkav) 3 Salawati Sorong, Mako Detasemen Artileri (Menart) Salawati Sorong, Mako Wing Udara III, serta Guest House Koarmada III.

Sedangkan pada aspek kesejahteraan prajurit, Yudo meresmikan flat bagi prajurit dan keluarganya bertipe 45 yang ada di Lantamal V Surabaya, Rumah Negara tipe 45 Lantamal III Jakarta, Rumah Negara tipe 70 Lantamal VIII Manado. Rumah Negara tipe 45 Pesapen, Gedung Mako Puslatur Baluran, serta Kolam Renang Tirto Sagoro 14.

"Di AL khususnya, ini akan terus berlangsung dan juga ini harus diikuti dengan pembangunan sarana prasarana juga perumahan prajurit," ucapnya. ● han

Pemerintah akan Revisi PP untuk Larang Jual Rokok Batangan dan Atur Rokok Elektrik

JAKARTA (IM) - Pemerintah berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Rencana perubahan revisi PP 109/2012 itu tertuang dalam lampiran Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/12).

Dikutip dari salinan Kepres 25/2022, ada beberapa ketentuan yang akan diubah melalui revisi PP 109/2012. PP tersebut akan mengatur penambahan luas persentase gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada produk tembakau.

Tahun 2024 PP juga akan mengatur ketentuan rokok elektronik; pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi; dan pelarangan penjualan rokok batangan. Perubahan PP juga akan mencakup pengawasan iklan, promosi, sponsorship produk

tembakau di media penyiaran, media dalam dan luar ruang, dan media teknologi informasi. Ketentuan mengenai pengakuan dan penindakan serta media teknologi informasi dan penerapan kawasan tanpa rokok (KTR) juga akan diatur melalui perubahan PP tersebut.

Dalam keppres ini disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan akan menjadi pemrakarsa revisi PP 109/2012. Pada 2021, Pusat Kajian Jaminan Sosial (PKJS) Universitas Indonesia pernah menyampaikan usul agar pemerintah melarang penjualan rokok secara ketengan alias batangan demi menekan tingkat prevalensi perokok aktif di Indonesia.

Berdasarkan hasil kajian PKJS UI, intensitas merokok tidak berkurang selama pandemi, bahkan di kalangan keluarga berpendapatan rendah yang terdampak Covid-19.

Hasil penelitian menemukan, 50,8 persen laki-laki dewasa atau suami responden yang mengikuti survei mengaku beralih (*shifting*) ke rokok dengan harga yang lebih murah alih-alih mengurangi intensitas. ● mei

KPK Fasilitas KY Periksa Tersangka Hakim Yustisial MA

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memfasilitasi Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan pemeriksaan etik terhadap Hakim Yustisial pada Mahkamah Agung (MA), Elly Tri Pangestu (ETP), Senin (26/12).

Elly Tri Pangestu merupakan salah satu tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

"Hari ini informasi yang kami peroleh, KY akan melakukan permintaan keterangan soal etik terhadap tersangka ETP hakim yustisial MA. KPK akan fasilitasi pemeriksaan tersebut diruang pemeriksaan lantai 2 Gedung Merah Putih KPK," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkat kepada wartawan, Senin (26/12).

KPK mendukung proses penegakan kode etik KY terhadap para hakim yang terjerat kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Salah satu bentuk dukungan KPK terhadap KY, kata Ali, dengan memfasilitasi pemerik-

saan etik terhadap para hakim yang menjadi tersangka dalam perkara ini.

"Fasilitas ini sebagai bagian sinergi antar lembaga karena KPK tentu tidak hanya lakukan penindakan saja namun penting juga upaya-upaya pencegahan korupsi pada sektor peradilan," terangnya.

Lebih lanjut, Ali mengklaim bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya pencegahan di sektor peradilan terkait para hakim yang menjadi tersangka KPK. Salah satu upaya pencegahan KPK, dengan melakukan identifikasi dan kajian kerawanan korupsi pada peradilan.

"KPK melalui STRANAS PK juga mendorong penerapan SPPTI, agar penanganan perkara oleh para aparat penegak hukum dapat tercatat dan terpantau dengan baik. Hal ini mendorong percepatan, efektivitas, serta efisiensi penanganan perkara," ujarnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan 13 tersangka terkait kasus dugaan suap

pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Mereka yakni, dua Hakim Agung, Sudrajad Dimiyat dan Gazalba Saleh. Kemudian, dua Hakim Yustisial sekaligus Panitera Pengganti, Elly Tri Pangestu dan Prasetyo Nugroho.

Selanjutnya, Staf Gazalba Saleh, Redhy Novarisza (RN); empat PNS MA, Desy Yustria (DY), Muhajir Habibie (MH), Nurmantio Akmal (NA), dan Albasri (AB). Lantas, dua Pengacara, Theodorius Yosep Parera (TYP) dan Eko Suparno (ES). Terakhir, dua Debitur Koperasi Simpan Pinjam Itidana, Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam perkara ini, Sudrajad, Elly, Desy Yustria, Muhajir Habibie, Nurmantio Akmal, Gazalba, Prasetyo, dan Albasri diduga telah menerima sejumlah uang dari Heryanto Tanaka serta Ivan Dwi Kusuma Sujanto. Uang itu diserahkan Heryanto dan Ivan melalui Pengacaranya, Yosep dan Eko Suparno. ● han



SIDANG LANJUTAN KASUS PEMBUNYAN BRIGADIR J

Terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat, Richard Eliezer (kiri) berbincang dengan tim kuasa hukumnya dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Senin (26/12). Sidang tersebut beragenda mendengarkan keterangan saksi ahli yang dihadirkan oleh Tim Kuasa Hukum Richard Eliezer diantaranya Guru Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno, psikolog klinik dewasa Liza Marielly Djaprie dan psikolog forensik Reza Indragiri Amriel.

KPK Perpanjang Pencegahan untuk Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, Kementerian Hukum, dan Hak Asasi Manusia (Kemendikhum) kembali mencegah mantan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Karen Agustiawan dari bepergian ke luar negeri untuk selama enam bulan ke depan.

Karen sebelumnya dicekal selama 6 bulan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan liquefied natural gas (LNG) di PT Pertamina tahun 2011-2021. Pencegahan itu telah berakhir pada 8 Desember.

"KPK kembali memperpanjang masa cegah tidak bepergian keluar negeri terhadap 4 orang yang terkait dengan perkara ini hingga 6 bulan ke depan," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, dalam

pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (22/12). Tiga orang lainnya adalah eks Plt Dirut Pertamina 2017, Yenni Andayani; mantan Direktur Gas Pertamina, Hari Karyulianto; dan Dimas Mohamad Aulia dari pihak swasta.

Dimas diketahui merupakan anak Karen. Keempat orang tersebut akan dilarang bepergian ke luar negeri sejak Desember 2022 hingga Juni 2023.

Perpanjangan masa pencegahan diajukan karena penyidik KPK masih memerlukan waktu untuk melakukan penyidikan.

"Proses pengumpulan dan melengkapi alat bukti masih dilakukan hingga saat ini oleh tim penyidik," kata Ali.

Ia pun mengingatkan para pihak yang dicekal tersebut bersikap kooperatif mengikuti proses penyidikan yang telah ditetapkan penyidik. ● mei



KOMISI YUDISIAL PERIKSA HAKIM TERSANGKA KASUS SUAP

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) M. Taufiq HZ (tengah) didampingi Komisiner KY sekaligus Ketua Tim Pemeriksa Binziad Khadafi (kiri) dan Juru Bicara KY Miko Ginting (kanan) memberikan keterangan terkait pemeriksaan tersangka Hakim Yustisial MA di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (26/12). Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan etik terhadap Hakim Yustisial Elly Tri Pangestu (ETP) yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.